

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan waduk di Indonesia diharapkan dapat menjadi solusi guna mengatasi krisis air kedepan khususnya di Pulau Jawa. Pembangunan waduk selain dapat meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat, maka memiliki multifungsi terhadap berbagai dimensi kehidupan masyarakat. Pertama, pembangunan waduk berfungsi untuk menyediakan air bagi para petani, melalui jaringan irigasi yang diharapkan meningkatkan produksi pertanian dan meningkatkan ketahanan pangan nasional. Kedua, pembangunan waduk juga berfungsi sebagai penyediaan air baku bagi kebutuhan sehari-hari penduduk sehingga dapat terhindar dari kekurangan air. Ketiga, pembangunan waduk dapat pula berfungsi sebagai sumber pembangkit tenaga listrik yang dapat mensuplai kebutuhan penduduk akan penerangan dan berbagai kebutuhan lainnya. Keempat, pembangunan waduk juga dapat berfungsi sebagai sarana konservasi air yakni dapat menahan air lebih lama sehingga memungkinkan penyerapan air yang lebih besar dan memberikan kontribusi terhadap pengisian kembali air tanah. Kelima, pembangunan waduk juga dapat menjadi sarana pariwisata sehingga dapat menambah pendapatan penduduk sekitar dan sumber PAD (Pendapatan Asli Daerah) bagi Pemerintah Daerah setempat (<https://www.pu.go.id/berita> dikutip pada 14 oktober 2017, jam 10.00 WIB 2011).

Pembangunan Waduk Jatigede mengacu kepada Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Provinsi Jawa Barat Nomor 598.82/ SK.1266-Pem. Um/ 81 tanggal 16 September 1981 tentang penerbitan izin pembebasan tanah dan tata cara pengadaan lahan dan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Dalam Negeri dengan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 77 tahun 1984 tanggal 5 November 1984.

Surat Keputusan Bersama (SKB) tersebut kemudian dijadikan landasan dalam pelaksanaan pembangunan Waduk Jatigede. Setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh pembuat kebijakan pasti menimbulkan dampak, baik positif maupun negatif. Kebijakan untuk membangun Waduk Jatigede ini pun tentu menimbulkan dampak positif dan negatif bagi lingkungan maupun masyarakat yang hidup di sekitar area pembangunan Waduk Jatigede.

Proyek pembangunan waduk Jatigede yang sudah direncanakan sejak tahun 1963 dan mulai digenangi pada 31 Agustus 2015, pelaksanaannya tidak terencana dengan baik sehingga menimbulkan masalah-masalah sosial terutama dalam konteks ekonomi yang terfokus pada kesejahteraan dalam segi penapatan masyarakat. Fungsi utama pembangunan waduk Jatigede ialah sebagai sumber irigasi di wilayah pantai utara Jawa Barat, diantaranya adalah kabupaten Majalengka, Cirebon, dan Indramayu. Untuk mengatasi kekurangan air bersih di daerah Pantura, bendungan ini juga akan dijadikan sumber air baku. Pemerintah Kabupaten Sumedang juga merencanakan kawasan bendungan sebagai kawasan wisata air untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. (kompas.com dikutip pada 14 oktober 2017, Jam 14.00)

Upaya pembangunan pada akhirnya bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat ke arah yang lebih baik, yang tercermin dalam peningkatan pendapatan memenuhi kebutuhan hidup. Dalam memenuhi kebutuhan hidup masyarakat, mereka harus mampu bergerak sendiri meningkatkan pendapatannya, salah satu upayanya yaitu memerlukan campur tangan atau bantuan dari luar karena pada umumnya suatu daerah pasti masih memiliki banyak keterbatasan, baik keterbatasan ide, pemikiran, perencanaan, pembiayaan, dan sebagainya. Campur tangan dari luar biasanya dari pihak pemerintah, karena pemerintah mempunyai tugas dan kewajiban untuk mensejahterakan warganya. Bantuan yang dimaksud adalah memberi kemudahan kepada masyarakat agar dapat bangkit membangun dirinya sendiri untuk meningkatkan taraf hidupnya.

Seperti yang telah dialami warga Desa Cibogo, Ciwangi, Cipaku, Paku Alam, dan Karang Pakuan di Kecamatan Darmaraja Kabupaten Sumedang adalah potret nyata daerah yang terkena dampak pembangunan waduk Jatigede.

Menurut Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sumedang, lahan yang dibutuhkan untuk pembangunan waduk Jatigede seluas 4941 ha terdiri dari kawasan hutan seluas 1361 ha dan lahan yang dimiliki oleh penduduk seluas 3580 ha. Keseluruhannya meliputi 26 Desa di 6 kecamatan dengan warga yang terkena dampak secara langsung sekitar 30.000 jiwa, dan 6 desa yang digenangi umumnya merupakan lahan produktif. Keseluruhan jumlah Kartu Keluarga yang menerima pembebasan lahan Waduk Jatigede adalah 10.924 KK. Pembebasan lahan menurut keputusan Pemerintah Provinsi Jawa Barat penggantian lahan memiliki 2 kategori: kategori 1 Rp. 138 juta per-KK dan kategori 2 Rp. 29,3 juta per-KK.

Dari penerimaan pembebasan lahan pada masyarakat yang terkena dampak pembangunan hasil tersebut digunakan masyarakat untuk biaya membangun rumah di tempat relokasi dan kebutuhan pokok sehari-hari. Salah satunya dari sekian desa yang terkena pembebasan lahan oleh pembangunan waduk Jatigede adalah Desa Paku Alam, Kecamatan Darmaraja, Kabupaten Sumedang.

Desa Paku Alam mayoritas penduduknya dalam memenuhi kebutuhan hidup yaitu bertani, selain bertani masyarakat Desa Paku Alam juga berdagang dan memanfaatkan kendaraan yang dimiliki seperti ngojek. Pertanian adalah sumber utama dalam memenuhi kehidupan mereka. Bisa dibayangkan lahan pertanian yang selama ini menjadi penghasilan utama dalam memenuhi kebutuhan mereka, tergusur untuk pembangunan waduk buatan, jelas sangat merugikan bagi kehidupan masyarakat terutama dalam kesejahteraan hidup. Masyarakat Desa Paku Alam saat ini sedang mengalami pergeseran mata pencaharian. Sebelum dibangunnya waduk mata pencaharian utama masyarakat adalah petani.

Proses perubahan mata pencaharian masyarakat tidak terlepas juga dari seberapa besar pendapatannya. Masyarakat masih harus mulai beradaptasi dalam proses transisi mata pencaharian. Karena kehidupan bertani dengan kehidupan pekerjaan lain sangatlah berbeda. Salah satunya adalah tingkat pendapatan yang didapat. Pergeseran mata pencaharian sangat mempengaruhi tingkat pendapatan masyarakat. Baik itu masyarakat yang bertani maupun masyarakat non-petani. Ketidak tersediaannya lahan untuk bertani dan juga harus beradaptasi dengan lingkungan yang baru adalah salah satu faktornya. Kini pendapatan masyarakat sudah mengalami perubahan. Banyak masyarakat yang mengalami peningkatan dalam pendapatannya namun tidak sedikit pula masyarakat yang mengalami penurunan.

Rencana pembangunan waduk yang telah dimulai sejak tahun 1963 yang disertai dengan sejumlah studi perencanaan dan mulai direndamnya kawasan tersebut pada 15 Agustus 2015 tetapi tidak pernah dituntaskan dengan memberikan perhatian kepada hak-hak warga yang terkena dampak demi keberlangsungan hidup.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis tertarik untuk meneliti bagaimanakah dampak dibangunnya waduk Jatigede terhadap pendapatan masyarakat Desa Paku Alam Kecamatan Darmaraja Kabupaten Sumedang.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan di atas, maka dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pendapatan masyarakat Desa Paku Alam Kecamatan Darmaraja Kabupaten Sumedang sebelum pembangunan Waduk Jatigede ?
2. Bagaimana pendapatan masyarakat Desa Paku Alam Kecamatan Darmaraja Kabupaten Sumedang sesudah pembangunan Waduk Jatigede ?

3. Bagaimana dampak pembangunan Waduk Jatigede terhadap perubahan pendapatan masyarakat Desa Paku alam Kecamatan Darmaraja Kabupaten Sumedang ?

C. Pembatasan Masalah

Dikarenakan banyaknya permasalahan penelitian maka penelitian ini dibatasi dampak dari pembangunan Waduk Jatigede terhadap pendapatan masyarakat Desa Paku Alam Kecamatan Darmaraja Kabupaten Sumedang. Pendapatan masyarakat hanya difokuskan kepada pendapatan sebelum dan sesudah pembangunan Waduk Jatigede pada tahun 2013 dan sesudah tahun 2014.

D. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, identifikasi masalah yang menjadi titik tolak seluruh rangkaian penelitian. Masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: “Bagaimana dampak dibangunnya Waduk Jatigede terhadap pendapatan masyarakat Desa Paku Alam Kecamatan Darmaraja Kabupaten Sumedang ?

E. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Masukan bagi instansi terkait yang terlibat dalam pembangunan waduk Jatigede baik pemerintah maupun swasta dan masukan bagi pengelola waduk Jatigede dalam hal pemberdayaan penduduk di desa sekitar waduk Jatigede.
2. Dapat menjadi acuan untuk pengembangan penelitian lebih lanjut khususnya yang berkaitan dengan dampak pembangunan Waduk Jatigede terhadap orientasi penduduk sekitar dalam meningkatkan taraf hidup.